

Pendidikan Karakter Menuju Indonesia Emas*

A. Supratiknya**

Menggunakan istilah *character building* atau pembangunan karakter, Ir. Soekarno sebagai salah seorang bapak pendiri bangsa bisa dikatakan sudah mulai mewacanakan apa yang kini kita sebut ‘pendidikan karakter’ sejak republik tercinta ini mulai berdiri (Samani & Hariyanto, 2013). Bahkan dengan istilah ‘pembangunan karakter’, yang diimajinasikan oleh tokoh yang kita kenal sebagai proklamator dan presiden pertama negara kita itu kiranya lebih luas atau lebih dalam dari pendidikan karakter sebagaimana lazim kita maknai sekarang, seperti akan menjadi jelas dalam paparan ini. Dengan ini saya ingin menunjukkan dua hal. Pertama, pendidikan karakter bisa dimaknai dan dilaksanakan dengan dua cara, yaitu secara *parsialis-spesialis* dan secara *integratif-generalis*. Kedua, saya ingin mempromosikan cara kedua yaitu pendidikan karakter yang integratif-generalis, sebab saya pikir itulah jalan yang paling lurus menuju – meminjam ungkapan yang dipakai oleh panitia seminar ini, ‘Indonesia emas’ yang sejati.

Pendidikan Karakter Parsialis-Spesialis

Secara sederhana karakter bisa diartikan sebagai ‘cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara’ (Samani & Hariyanto, 2013; h. 41). Pendidikan karakter dalam arti parsialis-spesialis adalah pendidikan karakter sebagaimana lazim kita pahami dan kita laksanakan dalam praktek pendidikan sekolah kita dari masa ke masa sejak zaman Orde Lama hingga kini. Saya sebut *parsialis*, sebab pendidikan karakter kita maknai dan kita tempatkan “hanya” sebagai bagian dari keseluruhan aktivitas pendidikan-pembelajaran di sekolah, entah sebagai mata pelajaran, kegiatan kokurikular, atau kegiatan yang disisipkan sebagai sejenis muatan tambahan dalam mata pelajaran, atau benar-benar sebagai kegiatan tambahan yang bersifat ekstrakurikular, seperti Pramuka. Saya sebut *spesialis*, sebab pendidikan karakter kita pandang sebagai kegiatan

khusus yang penyelenggaraannya kadang-kadang menuntut keterlibatan tenaga spesialis selain guru seperti konselor, psikolog, ustadz atau tenaga profesional lain.

Dalam arti parsialis-spesialis, pendidikan karakter dengan berbagai bentuk dan fokus masing-masing pada akhirnya lazim dimaknai sebagai usaha sadar sekolah untuk menanamkan keutamaan-keutamaan dalam diri peserta didik. Usaha ini meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognitif atau pemahaman tentang keutamaan yang diajarkan, aspek emosional atau motivasi untuk menginternalisasi atau membatinkan keutamaan yang sudah dipahami, dan aspek perilaku atau kerelaan untuk mewujudkan keutamaan yang sudah dipahami dan dibatinkan itu dalam tindakan nyata sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari peserta didik (Lickona, tt).

Keutamaan bisa dimaknai sebagai sifat manusia yang secara objektif baik (Lickona, tt). Kata ‘objektif’ mengacu pada kenyataan bahwa kebaikan dari sifat itu bisa dirasakan oleh semua orang. Dengan kata lain, kebaikan sifat itu juga berlaku baik bagi kehidupan orang per orang maupun bagi kehidupan bersama sebagai komunitas atau masyarakat. Bagi orang per orang, kehadiran sifat baik itu membuat seseorang mampu menjalani kehidupan secara bermakna, produktif, dan memuaskan. Bagi masyarakat, kehadiran sifat baik itu dalam diri setiap warganya membuat kehidupan bersama dapat berjalan secara efektif. Keutamaan atau sifat baik ini lahir atau muncul karena kita mampu menjalani kehidupan selaras dengan hukum alam, yaitu prinsip-prinsip yang berlaku bagi semua orang seperti kejujuran, hormat terhadap diri dan orang lain, kerja keras, cinta kasih, sikap ughari dalam segala hal, dan sikap melayani (Lickona, tt). Maka, keutamaan merupakan isi sekaligus standar atau patokan untuk mendefinisikan karakter yang baik, sehingga juga bisa dipandang sebagai tujuan akhir pendidikan karakter di sekolah.

Dalam sistem pendidikan sekolah kita, pendidikan karakter dalam arti parsialis-spesialis lazim dilaksanakan dalam berbagai bentuk program kegiatan, masing-masing memiliki fokus pada aspek kepribadian peserta didik yang berlainan namun yang secara bersama-sama berperan membentuk karakter peserta didik sebagaimana diamanatkan oleh sistem pendidikan nasional kita dari masa ke masa. Seperti direpresentasikan dalam pasal 3 UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, terkait perkembangan karakter pendidikan nasional bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi manusia

yang *beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia... kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab*. Dalam perjalanan sistem pendidikan nasional kita, kita saksikan berbagai jenis program kegiatan yang dimaksudkan untuk mewujudkan berbagai aspek kepribadian yang membentuk karakter peserta didik sebagaimana kita cita-citakan bersama. Beberapa di antaranya yang penting adalah sebagai berikut.

Pertama, *pendidikan agama*. Dalam rangka pendidikan karakter, program ini memiliki fokus memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama yang dianutnya (PP No. 55/2007). Sepanjang sejarah pendidikan sekolah kita, program ini dilaksanakan sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang dan jenis pendidikan, bahkan kini juga di semua jalur pendidikan.

Kedua, *pendidikan budi pekerti*. Dalam rangka pendidikan karakter, program ini memiliki fokus menanamkan tata krama, sopan santun, sebagaimana berlaku di tengah masyarakat. Ukuran sopan santun lazim diturunkan dari tradisi masyarakat setempat, misal keharusan menggunakan bahasa Jawa *krama* atau halus saat berbicara dengan orang yang lebih tua di lingkungan masyarakat Jawa. Pendidikan budi pekerti masuk menjadi salah satu mata pelajaran dalam Kurikulum SD 1947 dan selanjutnya digabung dengan pendidikan agama dalam Kurikulum SD 1964 dan diberi nama mata pelajaran Agama/Budi Pekerti (Koesoema, 2007).

Ketiga, *pendidikan moral khususnya pendidikan moral Pancasila*. Dalam rangka pendidikan karakter, program ini bertujuan menanamkan dalam diri peserta didik pengetahuan tentang yang benar atau baik dan yang salah atau buruk, niat untuk secara bebas memilih yang benar atau baik dan menghindari yang salah atau buruk, serta mewujudkan pengetahuan dan pilihan bebasnya itu dalam bentuk tingkah laku yang benar atau baik dan menghindari bertingkah laku salah atau jahat. Pendidikan Moral Pancasila dilaksanakan sebagai mata pelajaran dengan menggunakan nilai-nilai moral yang terdapat dalam Pancasila sebagai acuan. Di zaman Orde Baru pelaksanaan pendidikan moral yang mengacu pada dasar negara Pancasila itu diperluas tidak hanya bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah melainkan juga bagi mahasiswa

perguruan tinggi dan masyarakat luas melalui program kegiatan yang disebut penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalamalan Pancasila (penataran P4).

Keempat, *pendidikan kewarganegaraan*. Dalam rangka pendidikan karakter, program ini memiliki fokus menanamkan dalam diri peserta didik pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, niat untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sebagai warga negara sebagai bentuk ungkapan cinta pada Tanah Air, serta mewujudkannya dalam tindakan sebagai warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan sebagai mata pelajaran dengan berbagai nama, seperti Civics, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), atau Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kini.

Kelima, *pendidikan nilai*. Dalam rangka pendidikan karakter, program ini memiliki fokus membantu peserta didik menjernihkan nilai-nilai hidupnya, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang pantas dibela atau diperjuangkannya, tekad untuk menjadikan hal-hal yang bernilai itu sebagai tujuan atau sumber makna hidupnya, serta keberanian mewujudkan pilihan pada hal-hal yang bernilai itu dalam kehidupannya sehari-hari. Bentuk pendidikan karakter yang marak di Tanah Air dalam dasawarsa 1990-an ini lazim diselenggarakan sebagai program kegiatan kokurikular atau disisipkan dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu seperti Agama dan pendidikan moral, bukan sebagai mata pelajaran tersendiri.

Keenam, *pendidikan soft skills* atau *life skills*. Dalam rangka pendidikan karakter di sekolah, program ini memiliki fokus membantu peserta didik mengembangkan aneka ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di luar pengetahuan-ketrampilan formal yang diajarkan melalui pembelajaran mata pelajaran yang disebut *hard skills*. *Soft skills* atau *life skills* ini bisa berupa pengetahuan atau ketrampilan praktis, seperti pemahaman diri atau ketrampilan berkomunikasi, mengelola waktu, bekerja dalam tim, dan sebagainya. Bentuk pendidikan karakter yang marak di Tanah Air dalam dasawarsa 2000-an ini lazim diselenggarakan sebagai program kegiatan kokurikular atau disisipkan dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Agama, bukan sebagai mata pelajaran tersendiri.

Ketujuh, *pendidikan karakter* dalam arti parsialis-spesialis sebagaimana kita kenal dan dipraktekkan sekarang. Seperti sudah disinggung, program ini memiliki fokus

menanamkan dalam diri peserta didik keutamaan-keutamaan yaitu prinsip-prinsip kehidupan yang berlaku umum, sehingga dipahami, dibatinkan, dan diwujudkan dalam tindak-perbuatan sehari-hari. Konon program pendidikan ini dicanangkan sejak tahun 2009 bahkan secara implisit sudah digulirkan dengan diterbitkannya Permendiknas Nomor 23/2006 tentang standar kompetensi lulusan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas/kejuruan. Untuk jenjang sekolah dasar, program ini diselenggarakan sebagai kegiatan tersendiri setara mata pelajaran, terbukti dari tersedianya buku-buku pendidikan karakter pegangan guru untuk kelas I sampai dengan kelas VI sekolah dasar. Namun dari standar kompetensi lulusan secara jelas terbaca bahwa pendidikan karakter ini dilaksanakan dengan cara disisipkan (saya menghindari penggunaan istilah ‘diintegrasikan’ karena saya maknai secara berbeda seperti akan tampak nanti) dalam pembelajaran aneka mata pelajaran.

Sekolah Bukan Lembaga yang Netral

Menurut saya, model pendidikan karakter parsialis-spesialis memiliki paling sedikit dua kelemahan mendasar. Kelemahan pertama adalah sifatnya yang dikemas sebagai program kegiatan tersendiri, entah sebagai mata pelajaran, kegiatan kokurikular, atau kegiatan ekstrakurikular, termasuk ketika disisipkan sebagai *nurturant effects* atau dampak pengiring dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu. Situasi ini sangat berisiko melepaskan atau memisahkan kegiatan pendidikan karakter dari konteksnya khususnya konteks suasana kehidupan di lingkungan internal sekolah. Bisa terjadi, dalam pendidikan karakter di ruang kelas peserta didik mencerna aneka keutamaan, namun begitu keluar dari ruang kegiatan segera berhadapan dengan aneka bentuk kenyataan yang sama sekali berlawanan dengan apa yang baru dipelajari, seperti sikap guru mata pelajaran yang tidak empatik akibat kewalahan memenuhi tuntutan tugas administrasi, pembelajaran yang membosankan karena guru kurang bersungguh-sungguh mempersiapkannya akibat terbebani kerja atau tugas sampingan, dan sebagainya. Akibatnya, nilai-keutamaan yang dipelajari dalam kegiatan pendidikan karakter gagal dibatinkan dan diwujudkan menjadi tindak-perbuatan oleh peserta didik karena tidak mendapatkan *reinforcement* atau pengukuhan-pembenaran dari lingkungan sosial. Akibat lebih buruk, bisa muncul sikap sinis di kalangan peserta didik terhadap aneka nilai-keutamaan yang sering diucapkan

namun tidak dirasakan sebagai kenyataan dalam kehidupan mereka di sekolah, apalagi dalam kehidupan masyarakat luas.

Kelemahan kedua dan yang lebih serius, praktek pendidikan karakter semacam itu didasarkan pada asumsi atau pengandaian *idealis* bahwa sekolah merupakan lembaga yang otonom atau netral dan dijamin melaksanakan seluruh kegiatan pendidikannya sungguh-sungguh hanya demi kebaikan peserta didik sesuai misi utamanya, dan tidak ada kepentingan atau tujuan lain. Pengandaian ini diragukan bahkan ditentang oleh para pemikir dan pendidik *kritis*, seperti misalnya Louis Althusser (1918-1990), yang memandang sekolah sebagai *aparatus negara* (dalam Wignyawardaya, 2013). Menurut Althusser, kekuasaan nyata untuk mengatur kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat termasuk dalam bidang pendidikan, sesungguhnya bukan berada di tangan pemerintah resmi melainkan di tangan kekuatan tidak resmi tertentu yang berada di balik atau di atas pemerintah yang resmi, misalnya salah satu penguasa penting zaman sekarang adalah kapital atau modal atau uang.

Untuk melaksanakan dan mempertahankan kekuasaannya, kekuatan itu akan berusaha menyebarkan sistem gagasan, keyakinan dan nilai-nilai untuk mengarahkan tingkah laku orang dan seluruh masyarakat sesuai kepentingannya. Sistem gagasan, keyakinan dan nilai-nilai itu bukan hanya bersifat ideal atau spiritual dalam arti melayang-layang di awang-awang belaka, melainkan bersifat material dalam arti hadir secara konkret nyata dalam bentuk norma dan praktek kehidupan sehari-hari yang dihayati sebagai kewajiban di berbagai konteks kehidupan, termasuk sekolah.

Sekolah sebagai *aparatus pendidikan* memainkan peran penting dalam menyebarkan sistem gagasan, keyakinan dan nilai-nilai sekaligus mengukuhkan kedudukan kekuatan yang berkuasa itu, dengan cara mengajarkan kepada peserta didik tentang *know-how* berupa pengetahuan dan ketrampilan, *rules of good behavior* berupa sikap-karakter, *rules of morality, civic, and professional conscience* berupa aturan dan nilai-nilai, serta *rules of the order* berupa tata tertib yang secara “in silence” atau diam-diam di luar kesadaran kita semua pada dasarnya bertujuan memenuhi kepentingan kekuatan yang berkuasa itu.

Menurut para pemikir pendidikan kritis, sekolah mampu melawan kekuatan yang berkuasa itu dengan menerapkan pedagogi kritis agar dapat sungguh-sungguh

mewujudkan misinya mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter dan dengan begitu secara langsung maupun tidak langsung berperan menciptakan kehidupan sosial yang dipandu oleh keutamaan-keutamaan sejati. Menurut hemat saya, pribadi atau manusia berkarakter produk pendidikan kritis inilah yang dicita-citakan oleh Ir. Soekarno lewat *character building*, dan hanya pribadi-pribadi berkarakter hasil pendidikan dengan pedagogi kritis seperti dibayangkan oleh Ir. Soekarno inilah yang akhirnya akan mampu melahirkan masyarakat Indonesia yang benar-benar emas.

Pendidikan Karakter Integratif-Generalis

Pendidikan karakter integratif-generalis adalah model pendidikan karakter yang secara sadar-terencana memanfaatkan seluruh dimensi atau aspek kehidupan sekolah, meliputi isi kurikulum, proses pembelajaran, kualitas hubungan antara guru dan peserta didik maupun antar peserta didik, penyelenggaraan kegiatan kokurikular, dan etos lingkungan sekolah secara keseluruhan, untuk membantu perkembangan karakter peserta didik secara optimal (Battistich, tt). Jadi, model pendidikan karakter ini saya sebut *integratif* sebab memanfaatkan seluruh aspek kehidupan sekolah. Artinya, pembentukan karakter peserta didik tidak dilaksanakan melalui program kegiatan tersendiri seperti pada model pendidikan karakter parsialis-spesialis, melainkan melekat dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Model ini juga saya sebut *generalis* sebab penyelenggaraannya otomatis melibatkan seluruh personel sekolah melalui pelaksanaan tugas pokok masing-masing termasuk para peserta didik sendiri sebagai *peer character educators* bagi temannya, tanpa harus melibatkan bantuan tenaga ahli atau spesialis.

Secara umum, pendidikan karakter yang integratif-generalis didasarkan pada sejumlah pokok gagasan sebagai berikut. *Pertama*, guru (termasuk kepala sekolah) memiliki kesadaran bahwa mendidik-mengajar merupakan tindakan politis yang berlangsung baik di dalam maupun di luar kelas. Artinya, guru bukanlah sekadar pegawai yang bertugas melaksanakan berbagai konsep atau kebijakan yang diputuskan oleh sekelompok pakar dalam birokrasi pendidikan, melainkan merupakan intelektual yang menghayati tugasnya sebagai kerja intelektual. Seorang intelektual adalah orang yang menguasai bidang pekerjaannya, memiliki pengetahuan yang luas tentang hal-hal di luar bidang pekerjaannya, mampu menggunakan pengalaman untuk mengembangkan

teori atau pendapat baru dan mengkritisi teori atau pendapat yang ada berdasarkan pengalamannya itu, serta memiliki keberanian untuk mengkritisi otoritas dan setia dengan pengalaman serta pendapat pribadinya. Sebagai intelektual yang kritis, guru tidak akan mudah puas dan menerima saja keadaan yang ada, melainkan secara konstruktif, positif dan proaktif selalu berusaha memikirkan jalan-jalan alternatif demi mendapatkan hasil yang lebih memuaskan (Smyth, 2010). Jadi, seluruh tindakan guru baik di dalam maupun di luar kelas sudah harus mencerminkan usahanya mencari dan melaksanakan keutamaan-keutamaan yang juga akan ditularkan ke dalam diri peserta didik.

Kedua, seluruh pengalaman pendidikan di sekolah baik melalui kegiatan kurikular maupun kokurikular harus diarahkan bagi pembentukan peserta didik sebagai ‘manusia terpelajar’ (*the ideal of the educated person*) atau ‘manusia berkarakter’ seperti diimajinasikan oleh Ir. Soekarno, yaitu manusia atau pribadi yang berpengetahuan mendalam dan luas, menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan agar mampu menjadi warga komunitas yang efektif di tingkat lokal, nasional, maupun global, bersikap hormat dan peduli terhadap semua orang lain tanpa membedakan, serta mampu bertindak dengan penuh pertimbangan (Mulcahy, 2009). Jadi, seluruh kegiatan pendidikan-pengajaran di kelas maupun di luar kelas otomatis sudah diarahkan bagi pembentukan keutamaan-keutamaan dalam diri peserta didik.

Ketiga, bertolak dari keyakinan bahwa tujuan pendidikan adalah formasi intelektual, emosional, moral, dan spiritual atau pembentukan seluruh pribadi masing-masing peserta didik, maka metode pendampingan yang diterapkan oleh guru dalam semua kegiatan pendidikan baik di dalam maupun di luar kelas harus mampu melibatkan dan menggerakkan seluruh pengalaman, kapasitas atau kemampuan, serta minat-perhatian masing-masing peserta didik (Mulcahy, 2009).

Keempat, sekolah perlu memberi perhatian pada apa yang oleh filsuf Herbert Marcuse disebut ‘pendidikan estetika’, yaitu pendidikan yang bertujuan mempertemukan hati, akal, dan indra peserta didik melalui pendidikan seni (*arts education*), pendidikan kepekaan indra (*sensual education*), pendidikan alam atau lingkungan (*a return to nature*), dan pendidikan yang bernuansa feminis (*feminist*

pedagogy). Pendidikan seni meliputi seni rupa, musik, teater, dan aneka jenis seni lain termasuk seni pop dan seni anak muda zaman sekarang, perlu diberi tempat dalam pendidikan sekolah, karena seni mampu membangkitkan dan mengembangkan imajinasi, memungkinkan peserta didik menemukan cara-cara alternatif dalam memaknai keberadaannya, salah satu ciri pribadi yang berkarakter. Pendidikan yang melibatkan dan meningkatkan kepekaan seluruh indra, bukan hanya cipta melainkan juga karsa dan karya nyata, juga perlu diberi tempat dalam pendidikan sekolah sebab akan memungkinkan peserta didik mengeksplorasi dan mengenal dunia kehidupannya secara lebih menyeluruh, ciri lain pribadi yang berkarakter. Pendidikan alam lingkungan yang bertujuan menumbuhkan dalam diri peserta didik kesadaran dan apresiasi terhadap lingkungan alam bukan sekadar sebagai objek untuk dieksploitasi demi memuaskan hasrat tak terbatas manusia, melainkan sebagai harta yang harus dijaga dan dilestarikan karena manusia sendiri adalah bagian dari alam, juga perlu diberi tempat dalam pendidikan sekolah demi mengembangkann sikap ugahari, ciri lain dari pribadi yang berkarakter. Pendidikan yang lebih bernuansa feminis akan mengubah suasana kehidupan sekolah yang cenderung serba rasional-kaku-dingin yang merupakan ciri dunia kaum lelaki menjadi suasana kehidupan yang penuh empati, kepekaan-kepedulian, damai, jauh dari suasana eksploitasi yang menjadi ciri dunia kaum perempuan atau kaum ibu, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya peserta didik maupun seluruh warga komunitas sekolah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkarakter (Van Heertum, 2010).

Kelima, penilaian hasil pendidikan sekolah harus lebih mengandalkan pendekatan yang disebut *authentic assessment*, dan semakin meninggalkan pendekatan tes tulis apalagi tes tulis objektif pilihan ganda. Penilaian otentik mengandalkan penggunaan jenis-jenis tugas otentik untuk menilai hasil belajar murid. Tugas otentik memiliki sejumlah ciri sebagai berikut: (1) bersifat realistik, dalam arti memiliki kemiripan dengan cara pengetahuan dan ketrampilan peserta didik dipraktekkan dalam kehidupan nyata; (2) menuntut peserta didik mampu memberikan penilaian dan menunjukkan kreativitas; (3) menuntut peserta didik mengerjakan sesuatu yang konkret-nyata entah secara sendiri maupun dalam kelompok kecil; (4) mensimulasikan situasi kehidupan nyata yang sedang atau akan dihadapi oleh peserta didik; (5) menguji

kemampuan peserta didik mempraktekkan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengerjakan tugas yang kompleks; dan (6) memberi kesempatan kepada peserta didik berlatih mencari sumber-sumber, memperoleh *feedback*, dan menyempurnakan hasil belajarnya (dalam Supratiknya, 2012).

Penerapan model pendidikan karakter integratif-generalis dalam pelaksanaan pendidikan-pembelajaran di sekolah, kiranya akan mampu membantu sekolah menjaga otonominya sehingga juga mampu menjalankan misi menghasilkan pribadi-pribadi berkarakter, dan dengan begitu secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi penting menghantar seluruh bangsa menuju Indonesia emas sejati seperti dicita-citakan oleh para *founding fathers* sekaligus sebagaimana kita rindukan bersama. Semoga!

Daftar Acuan

- Battistich, V. (tanpa tahun). *Character education, prevention, and positive youth development*. Diunduh tanggal 5 Mei 2014 dari www.character.org/wp-content/uploads/.../White_Paper_Battistich.pdf.
- Koesoema, D.A. (2007). *Pendidikan karakter. Strategi mendidik anak di zaman global*. Jakarta: Garsindo.
- Lickona, T. (tanpa tahun). *What is effective character education?* Diunduh dari Internet.
- Mulcahy, D.G. (2009). Liberal education and the ideal of the educated person. *Makalah dipresentasikan dalam konferensi Asosiasi Kajian Pendidikan Amerika di Pittsburgh, November 4-8*. Diunduh dari Internet.
- Samani, M., & Hariyanto. (2013). *Konsep dan model pendidikan karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Smyth, J. (2010). Critical teaching as the counter-hegemony to neoliberalism. Dalam Sheila Macrine, Peter McLaren, & Dave Hill (Eds.), *Revolutionizing pedagogy. Education for social justice within and beyond global neo-liberalism* (h.211-234). New York: Palgrave.
- Van Heertum, R. (2010). Empowering education: Freire, cynicism, and a pedagogy of action. Dalam Sheila Macrine, Peter McLaren, & Dave Hill (Eds.), *Revolutionizing pedagogy. Education for social justice within and beyond global neo-liberalism* (h.211-234). New York: Palgrave.
- Wignyawardaya, A.S. (2013). Driyarkara dan pendidikan. Dalam I. Praptomo Baryadi (Ed.), *Membaca ulang pemikiran Driyarkara* (h. 59-64). Yogyakarta: Penerbit USD.

*Disajikan dalam Seminar Nasional dan Workshop Pendidikan bertema “Pendidikan karakter menuju Indonesia emas” yang diselenggarakan oleh Komunitas Rumah Cinta, Sabtu 17 Mei 2014, di Gedung Guru Diknas Provinsi Sulawesi Selatan.

** A. Supratiknya, psikolog, dosen Fakultas Psikologi dan mengajar di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.